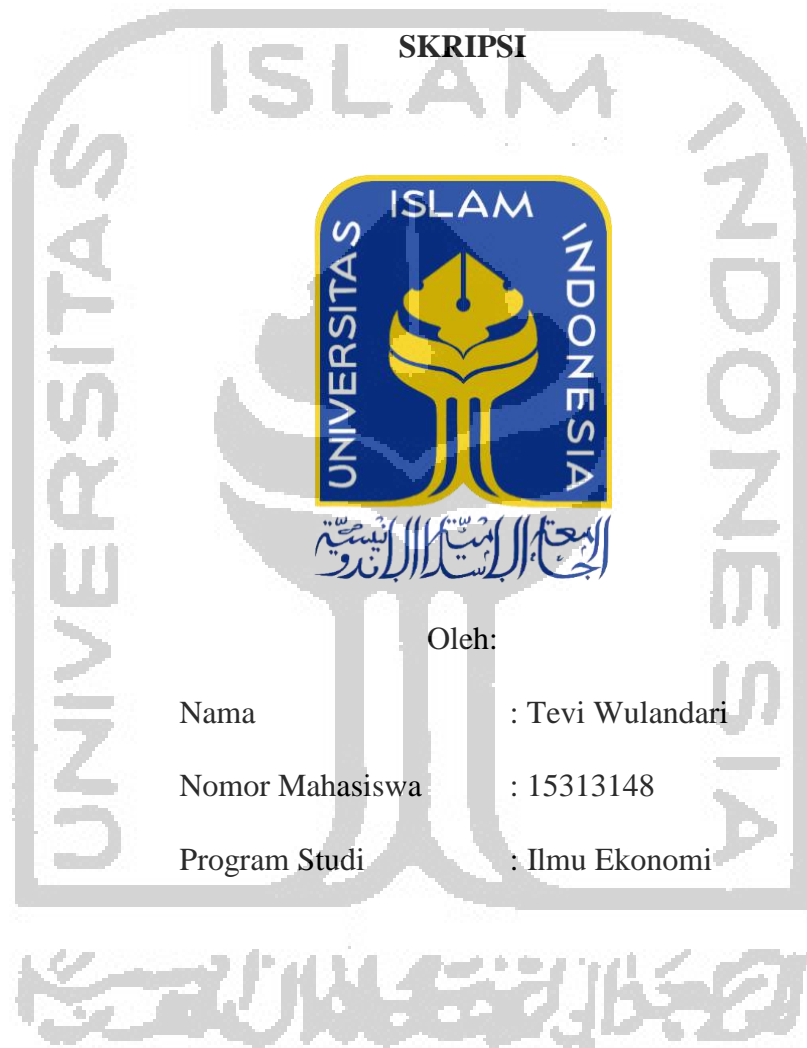


**EFISIENSI ALOKASI PENDAPATAN DAERAH PADA 4 DAERAH
DI JAWA BARAT; KOTA BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG,
KABUPATEN BANDUNG BARAT, KOTA CIMAHI**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Tevi Wulandari

Nomor Mahasiswa : 15313148

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

Efisiensi Alokasi Pendapatan Daerah Pada 4 Daerah Di Jawa Barat; Kota Bandung , Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata I

Program Studi Ilmu Ekonomi,

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Tevi Wulandari

Nomor Mahasiswa : 15313148

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh –sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.



Yogyakarta,



Tevi Wulandari

PENGESAHAN

Efisiensi Alokasi Pendapatan Daerah Pada 4 Daerah Di Jawa Barat; Kota Bandung , Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi

Nama : Tevi Wulandari

Nomor Mahasiswa : 15313148

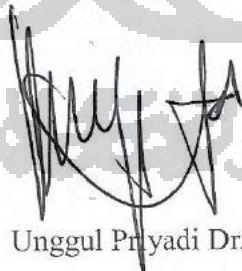
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta,

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

ace
upar 2009
13/08



Unggul Priyadi Dr.,M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**EFISIENSI ALOKASI PENDAPATAN DAERAH PADA 4 DAERAH DI JAWA BARAT;
KOTA BANDUNG, KAB BANDUNG, KAB BANDUNG BARAT, KOTA CIMAHI**

Disusun Oleh : **TEVI WULANDARI**

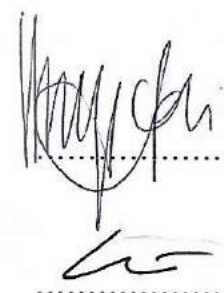
Nomor Mahasiswa : **15313148**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 11 September 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Unggul Priyadi, Dr., M.Si.**

Penguji : **Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc**



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang ini. Dalam hal ini penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efisiensi Alokasi Pendapatan Daerah Pada 4 Daerah Di Jawa Barat; Kota Bandung , Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi”

Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Hambatan dan kendala banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan baik secara moril ataupun materiil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

- 1) Bapak Unggul Priyadi Dr.,M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi.
- 2) Bapak Jaka Sriyana Dr.,S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik
- 3) Ibu Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati, S.E.,M.E.K yang memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini
- 4) Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

- 5) Kedua orang tua tercinta , Widi Harsoyo dan Rosmawati yang selalu memberi doa dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi
- 6) Kedua adik saya tercinta, Ario Dimas Permadi dan Jihan Nadiah yang selalu memberi doa dan dukungan
- 7) Kepada Muhammad Iqbal Irfani, sebagai seseorang yang selalu membantu dan memberi doa maupun dukungan tanpa henti dalam seluruh proses penyusunan skripsi ini
- 8) Kepada teman-teman saya tercinta, Aprilia Risti Juwita, Meidita Ariandini, Valentinna Rossy Aprilia, Fika Wulandari, dan Safira Qisthi yang selalu memberikan dukungan tanpa henti
- 9) Kepada teman-teman saya tercinta, Nadiah Hana dan Meliana Yulisa yang selalu memberikan semangat
- 10) Kepada teman-teman KKN yang tercinta, Devina Florensia, Fitria Febriana, Ardin Nashrullah, dan Lukman Hidayat yang telah memberikan dukukan tanpa henti
- 11) Kepada teman-teman Ilmu Ekonomi 2015 yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
- 12) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan

Penulis menyadari bahwa masih banyak hal yang kurang dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap jika ada masukan serta saran yang bersifat membangun. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi

banyak pihak terutama para almameter Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 2019

Penulis

Tevi Wulandari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	9
2.2.2 Dana Perimbangan.....	9
2.2.2.1 Dana Bagi Hasil.....	9
2.2.2.2 Dana Alokasi Umum.....	10
2.2.2.3 Dana Alokasi Khusus.....	11
2.2.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah.....	12
2.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar.....	12
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia.....	12
2.2.6 Pengertian Efisiensi.....	13
2.3 Kerangka Pemikiran.....	13
BAB III.....	15
METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1 Jenis dan Sumber data.....	15
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	16
3.2.2 Variabel Input.....	16
3.2.3 Variabel Output.....	17
3.3 Metode Analisis dan Penelitian.....	17
3.4 Nilai Manajerial DEA.....	19

3.5 Model Matematis DEA	20
3.5.1 Model Constant Return To Scale (CRS)	20
3.5.2 Model Variable Return To Scale (VRS).....	21
3.6 Efisiensi Skala.....	22
3.7 Return to Scale (RTS)	23
3.8 Keunggulan dan Kelemahan DEA	23
3.8.1 Keunggulan	24
3.8.2 Kelemahan.....	24
BAB IV	25
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Analisis Data Deskriptif	25
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
4.1.2 Dana Perimbangan	29
4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	32
4.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi	34
4.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	37
4.2 Pemilihan Model Uji Efisiensi	39
4.3 Hasil Pengujian	39
4.4 Pembahasan.....	45
BAB V.....	48
PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Implikasi.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	52
LAMPIRAN 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Daerah di Jawa Barat (2011-2015)	52
LAMPIRAN 2. Dana Perimbangan 4 daerah di Jawa Barat	53
(2011-2015).....	53
LAMPIRAN 3. Lain-Lain Pendapatn Yang Sah 4 Daerah di Jawa Barat (2011-2015)	54
LAMPIRAN 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4 daerah di Jawa Barat	55
(2011-2015).....	55
LAMPIRAN 5. Indeks Pembangunan Manusia di 4 Daerah di Jawab Barat (2011-2015)	56

LAMPIRAN 6. Inefisiensi Kabupaten Bandung 2011-2015	57
LAMPIRAN 7. Inefisiensi Kabupaten Bandung Barat 2011-2015.....	58
LAMPIRAN 8. Efisiensi Kabupaten Bandung	59
LAMPIRAN 9. Efisiensi Kabupaten Bandung	61
LAMPIRAN 10. Efisiensi Kabupaten Bandung Barat	63
LAMPIRAN 11. Efisiensi Kota Cimahi	65
LAMPIRAN 12. Nilai Efisiensi 4 Daerah di Jawa Barat Tahun.....	67
2011-2015.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Daerah di Jawa Barat.....	26
Tabel 4. 2 Dana Perimbangan 4 daerah di Jawa Barat (2011-2015).....	29
Tabel 4. 3 Lain-Lain Pendapatn Yang Sah 4 Daerah di Jawa Barat.....	32
Tabel 4. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4 daerah di Jawa Barat (2011-2015)	34
Tabel 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia di 4 Daerah di Jawa Barat	37
Tabel 4. 6 Inefisiensi Kabupaten Bandung 2011-2015	41
Tabel 4. 7 Inefisiensi Kabupaten Bandung Barat 2011-2015.....	43
Tabel 4. 8 Nilai Efisiensi 4 Daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2015.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu daerah yang mandiri dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan nasional. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang disebut Desentralisasi. Hal ini dilakukan agar supaya nantinya daerah akan mampu membiayai pembangunan daerah itu sendiri atau dengan kata lain daerah itu bisa mandiri (Adam, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Indonesia dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah menganut asas desentralisasi dimana pemerintah pusat memberi keleluasaan dan wewenang sendiri untuk pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Namun terdapat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana pemerintah daerah atau kepala daerah diberi kewenangan sendiri dalam mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi yang dibangun masyarakat itu sendiri (Usman, 2017).

Daerah yang melakukan otonomi dengan melakukan penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah secara bertanggung jawab dan terbuka, yang dimana harus diikuti dengan pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya nasional secara efisien dan adil. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perimbangan keuangan perlu dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tingkat kesiapan suatu daerah dapat berbeda, bisa dalam sektor sumber daya

maupun kemampuan mengatur daerah agar otonomi daerah bisa diselenggarakan. Setiap daerah dapat menyelenggarakan otonomi ketika memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan yang didapatkan dari pendapatan daerahnya, yang menunjukkan suatu daerah memiliki kebijakan khusus untuk dapat mengelola sumber pendapatan daerah tersebut, kemudian menggunakan pendapatan tersebut sesuai kebutuhan daerah yang tepat sasaran. Maka dari itu suatu daerah harus meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat, karena PAD merupakan sumber pendapatan terbesar yang bisa dioptimalkan (Hertanto & Sriyana, 2011).

Peran pendapatan daerah sangat penting, dikarekanakan suatu daerah menyelenggarakan otonomi daerah dimana pemerintah daerah mengelola pembangunan ekonomi secara mandiri tanpa banyaknya bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, pengelolaan pendapatan suatu daerah harus efektif dan aktif dalam menggali sumber-sumber pendapatan suatu daerah. Selain itu suatu daerah harus mempersiapkan dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada daerahnya. Hal ini terjadi karena di Indonesia masih banyak daerah yang sangat ketergantungan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah-daerah di Indonesia belum terbiasa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi hal penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah (Rosmaniar, 2012)

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya (Hertanto & Sriyana, 2011).

Pembangunan di Indonesia menciptakan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah, salah satunya beberapa daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Pada Kota Bandung, jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima mencapai Rp6.311.079.097, Kabupaten Bandung mencapai Rp8.295.767.500, Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp2.175.826.863 dan Kota Cimahi mencapai Rp1.186.795.889, dimana 4 daerah tersebut setiap tahunnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dengan rata-rata mencapai 6% lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Indonesia yang hanya mencapai 5% dan terus menurun dalam beberapa tahun kebelakang.

Berdasarkan latar belakang berikut yang membahas tentang otonomi daerah, pencapaian pendapatan daerah (PAD) dan pembangunan daerah Kota Bandung, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Efisiensi**

Alokasi Pendapatan Daerah Pada 4 Daerah Di Jawa Barat; Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi”

1.2 Rumusan Masalah

Menganalisis tingkat efisiensi dari variabel input pendapatan daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM).

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis tingkat efisiensi penerimaan pendapatan daerah pada 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat memberikan informasi mengenai keberlangsungan suatu kebijakan publik bagi perkembangan pada dunia ilmu ekonomi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengukur efisiensi sektor publik dalam hal ini pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain lain yang sah sebagai input terhadap pertumbuhan ekonomi yang sekaligus sebagai output, sehingga pemerintah dapat lebih efisien dan efektif dalam menentukan kebijakan.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori, konseptual yang ada untuk kemudian diimplementasikan di dunia nyata.

c. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi pembaca, khususnya dalam determinasi efisiensi.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Neneng Erlina Indriati (2014) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan). Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). (Jurnal;Ekonomi dan studi pembangunan,Dipublikasikan)	Secara rata-rata terjadi inefisiensi, namun selama periode penelitian untuk efisiensi teknis biaya bidang pendidikan yang konsisten mencapai skor efisiensi maksimum 100 persen adalah Kecamatan Batu Lanteh. Sedangkan daerah yang sudah mencapai kondisi efisien dalam teknis sistem adalah Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Rhee dan Kecamatan Maronge.
2	Indomas Gusti Maredh Nesia (2018) Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Pada Tahun 2010-2016. Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). (Skripsi;Dipublikasikan)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan 3 tahun dari sampel 7 tahun mengalami efisiensi sempurna yaitu pada tahun 2010, 2013, dan 2014. Serta terdapat 4 dari 7 kurun waktu yang diambil untuk sampel yang mengalami tingkat efisiensi tidak sempurna yaitu pada tahun 2011, 2012, 2015, dan 2016.
3	Asprilla Dedy Perdana (2017) Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2015. Penelitian	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang mampu mencapai dan mempertahankan tingkat efisien (100%) yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, dan

	<p>ini menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). (Skripsi;Dipublikasikan)</p>	<p>Kabupaten Sleman. Sedangkan Kabupaten/kota yang mengalami inefisien adalah kabupaten Bantul yang hanya mampu meraih tingkat efisiensi pada tahun 2013 sebesar 69,1%, tahun 2014 sebesar 64,41%, dan pada tahun 2015 sebesar 65,24%.</p>
4	<p>Zulfahmi Pratama, I Wayan Subagiarta, Badjuri (2016) Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintahan Daerah Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). (Skripsi;Dipublikasikan)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur cenderung sama nilainya dan mengalami inefisien. Kota Madiun dan Kota Malang pada tahun 2009 mempunyai tingkat efisien sempurna (100%), akan tetapi pada tahun 2010-2012, Kota Malang dan Kota Madiun mengalami penurunan tingkat efisien. Sedangkan Kota Batu dan Kota Mojokerto mengalami kenaikan tingkat efisien yang mencapai 100%.</p>
5	<p>Duta Sabilila Rusydi, Dewi Kusuma Wardani, Salman A. Totalia (2015). Analisis Efisiensi Relatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012. Penelitian ini menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). (Jurnal;Dipublikasikan)</p>	<p>Terdapat 12 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2007, 8 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2008, 6 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2009, 5 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2010, 6 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2011 dan 9 Kabupaten / Kota yang efisien tahun 2012. Lalu Terdapat 23 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2007, 27 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2008, 29 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2009, 30 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2010, 29 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2011 dan 26 Kabupaten / Kota yang belum efisien tahun 2012.</p>

Berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu, penggunaan modal dana berupa pendapatan regional sebagai input daerah dalam mencapai pembangunan wilayah yang baik terhadap output daerah yang merupakan hasil dari sebuah perwujudan kebutuhan suatu daerah, dimana modal dana yang digunakan sesuai dengan nominal yang sudah dianggarkan. Adapun anggaran tiap daerah memiliki nominal yang berbeda dan cara penggunaan anggaran tersebut juga berbeda sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah masing-masing. Maka dari itu, perlunya mengukur efisiensi pengelolaan pendapatan regional sebagai input dalam meraih output suatu daerah menggunakan metode DEA, sehingga dapat dikatakan suatu daerah bisa mengevaluasi kinerja dalam mengalokasikan variabel input untuk mencapai variabel output agar mencapai tingkat yang efisien berupa efisien relatif 1,000 atau 1%. Hal ini merujuk pada penelitian Duta Sabiila Rusydi, Dewi Kusuma Wardani dan Salman A. Totalia (2015) yaitu Analisis Efisiensi Relatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2012. Letak perbedaannya adalah pada variabel dan objek yang diteliti, dimana pada penelitian ini akan meneliti alokasi pendapatan daerah menggunakan variabel input PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap variabel output laju pertumbuhan ekonomi dan IPM pada 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Sementara penelitian oleh Duta Sabiila Rusydi, Dewi Kusuma Wardani dan Salman A. Totalia menggunakan variabel input PAD, DAU, DAK, Dana bagi hasil, jumlah penduduk terhadap PDRB dan IPM pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari hasil sumber-sumber yang ada di daerah tersebut yang diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Saqia, Dinar Putri (2016)]

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 13 yaitu Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 6 bahwa dana perimbangan terdiri dari:

- a) Bagian daerah dari PBB, BPHTB, dan penerimaan SDA
- b) Dana Alokasi Umum
- c) Dana Alokasi Khusus

2.2.2.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat 2 terdiri atas:

Daerah mendapatkan 90% bagian Pajak Bumi Bangunan (PBB) dengan rincian sebagai berikut:

16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi

64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi

9% untuk biaya pemungutan

Sedangkan pemerintah mendapatkan 10% bagian Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB dengan rincian sebagai berikut:

1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota
2. 35% dibagikan secara insentif kepada seluruh kabupaten/kota

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB berupa 80% dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16% diberikan kepada daerah yang bersangkutan dan masuk ke kas umum daerah
- b) 64% diberikan kepada daerah penghasil BPHTB dan masuk ke kas umum daerah

2.2.2.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 1 bahwa dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan kepada daerah yang bertujuan agar terlaksananya pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikut rincian perhitungan DAU menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 7 sebagai berikut:

- A. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari APBN
- B. DAU diberikan kepada daerah masing-masing sebesar 10%
- C. Jika terjadinya perubahan kewenangan suatu daerah, maka persentasi DAU disesuaikan dengan perubahan tersebut
- D. DAU ditetapkan atas perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah dengan porsi daerah yang sudah ditentukan

2.2.2.3 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 bahwa dana alokasi khusus atau DAK merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditujukan kepada daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan tertentu. Berikut rincian perhitungan DAK dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 8:

- a) DAK yang dimaksud berasal dari dana reboisasi dengan imbang 40% diberikan kepada daerah penghasil
- b) DAK yang berasal dari dana reboisasi dengan imbang 60% yang diberikan kepada pemerintah pusat
- c) Kebutuhan tertentu yang dialokasikan dari DAK merupakan kebutuhan yang tidak bisa diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan suatu prioritas nasional

2.2.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak berasal dari PAD dan dana perimbangan, dimana terdiri dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang sudah ditetapkan pemerintah [Duta Sabila, Dewi Kusuma, Salman A, 2015]. Berikut rincian lain-lain pendapatan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan Bunga
- d) Keuntungan selisih dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Hasil dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah

2.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Menurut Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh dalam jangka panjang yang disebabkan oleh beberapa syarat yang diperlukan dalam perekonomian. Fungsi produksi dalam teori ini adalah ketika modal hanya menciptakan suatu tingkat output tertentu, ketika kombinasi modal berubah maka output yang dihasilkan juga berubah. Dalam menumbuhkan perekonomian maka dibutuhkan adanya stok modal berupa investasi-investasi baru [Nugroho, Stefanus Aditya, 2009]

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan besaran tingkat penduduk yang dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang layak [Badan Pusat Statistik]. Suatu daerah bisa

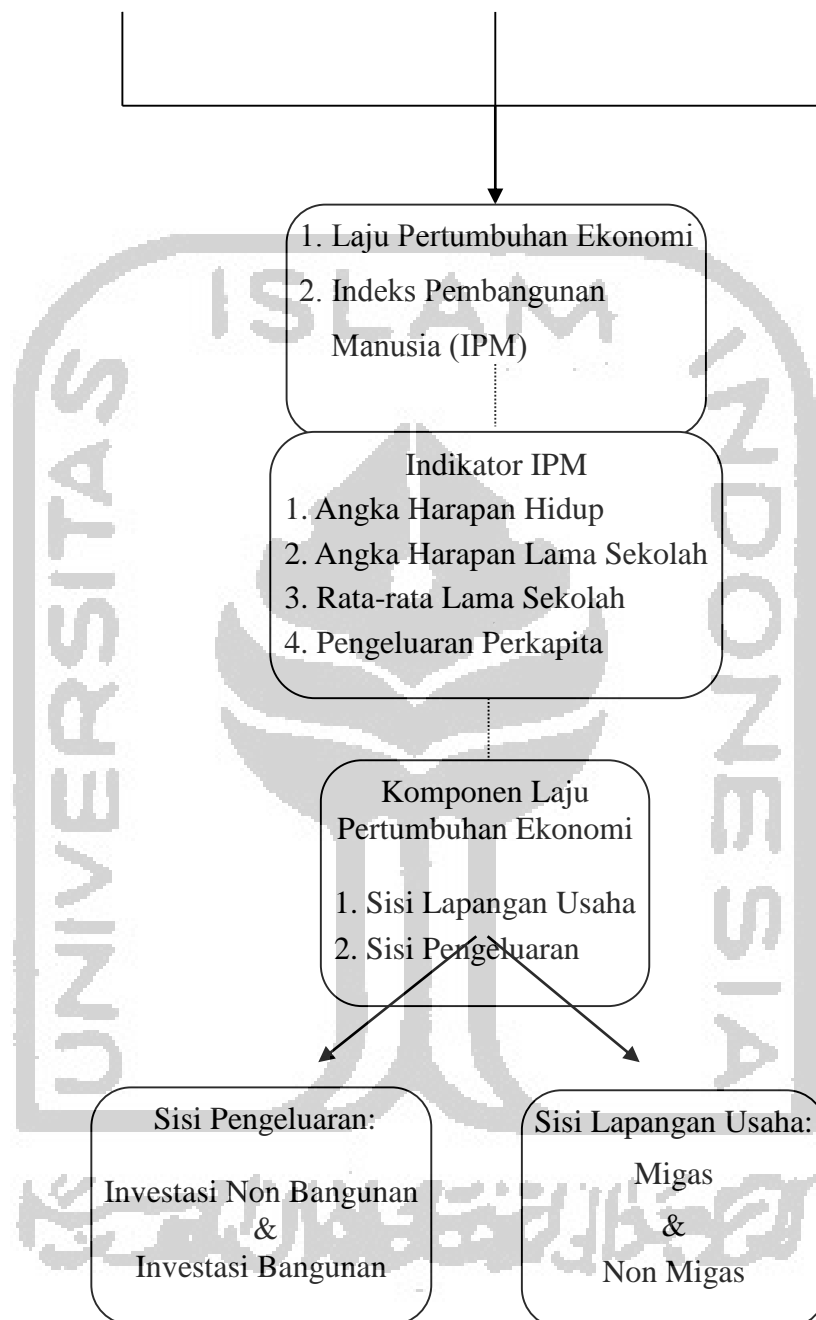
dikatakan berhasil dalam pembangunan wilayahnya dapat diukur menggunakan beberapa parameter, salah satunya IPM atau *Human Development Indeks* (HDI) dimana IPM menggunakan 3 indikator yakni angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Maka dari itu IPM merupakan ukuran untuk memperlihatkan kinerja suatu daerah dalam pembangunan ekonomi mencakup kualitas hidup penduduk dan standar hidup yang layak [Zulfikar Mohamad, 2017]

2.2.6 Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah suatu cara dalam bentuk usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu hal secara tepat dan optimal dengan memperhatikan segi waktu, tenaga, maupun biaya yang diminimalisir [D Sagitariansyah, 2011]. Menurut Mulyadi (2007), Efisiensi adalah ketepatan suatu cara dalam menjalankan sesuatu dengan meminimalisir waktu, biaya, dan tenaga dimana terdapat rasio input dan output atau biaya dan keuntungan.

2.3 Kerangka Pemikiran





Penelitian ini menggunakan metode DEA, dimana dalam operasinya menggunakan variabel input yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan variabel outputnya

yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel input pada 4 daerah di Jawa Barat antara lain Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi berupa pendapatan regional yang dialokasikan untuk pengembangan pembangunan wilayah dalam mewujudkan output yang diharapkan. Sedangkan variabel output berupa hasil dari perwujudan pembangunan wilayah yang berasal dari input masing-masing daerah. Kemudian dilakukan olah data variabel input dan variabel output menggunakan DEA dimana memperlihatkan efisiensi dan inefisiensi masing-masing daerah dalam penggunaan pendapatan regional. daerah terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang dipublikasi oleh instansi atau organisasi yang bukan pengelolanya, dan laporan

tahunan yang ada di daerah setempat. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa instansi atau sumber-sumber lain. Adapun data yang digunakan antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), dalam metode ini memerlukan data variabel yang terdiri dari variabel input dan variabel output, suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

3.2.2 Variabel Input

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

3.2.2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3.2.2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Merupakan pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Pendapatan ini antara lain yaitu dari hibah, dana

darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.2.3 Variabel Output

3.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Merupakan peningkatan dalam sistem perekonomian atau pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai tambah dari produksi barang dan jasa masyarakat daerah (PDRB) yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merupakan indeks pembangunan manusia yang mengukur capaian dari pembangunan antara lain yaitu pencapaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang merupakan acuan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita. Ukuran dari IPM merupakan salah satu variabel dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian wilayah.

3.3 Metode Analisis dan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis frontier dengan pendekatan non-parametrik yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). Dimana pendekatan non-parametrik lebih sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini memiliki asumsi varian yang berbeda satu sama lain, memiliki

perbedaan pada satuan pengukuran serta data yang digunakan berjenis nominal. Selain itu, DEA merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk mengetahui nilai efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan atau unit kerja yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan. DEA menghitung ukuran efisiensi secara skalar dan menentukan level input dan output yang efisien untuk unit yang dievaluasi. Metode DEA diciptakan sebagai alat evaluasi kinerja suatu aktivitas di sebuah unit entitas (organisasi) yang selanjutnya disebut Decision Making Unit (DMU). Secara sederhana, pengukuran ini dinyatakan dengan rasio output/input, yang merupakan suatu pengukuran efisiensi atau produktivitas.

DEA lebih memfokuskan tujuannya, yaitu mengevaluasi kinerja suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Suatu UKE dikatakan efisien secara relatif apabila nilai dualnya sama dengan 1 (nilai efisiensi 100 persen), sebaliknya apabila nilai dualnya kurang dari 1 maka UKE bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif. Analisis yang dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap efisiensi relatif dari UKE yang sebanding, selanjutnya UKE-UKE yang efisien tersebut akan membentuk garis frontier. Apabila UKE berada dalam garis frontier, UKE tersebut dapat dikatakan efisien relatif dibandingkan dengan UKE lainnya dalam sampel.

Dalam DEA, efisiensi relatif unit kegiatan ekonomi (UKE) didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbang (total weighted output / total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (weights) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat, diantaranya adalah :

1. tidak bernilai negatif
2. bersifat universal ;

Artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output / total weighted input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output / total weighted input ≤ 1).

3.4 Nilai Manajerial DEA

Teori DEA memiliki beberapa konsep nilai yang digunakan sebagai dasar proses manajerial yaitu (PAU UGM, 2000) :

1. Nilai rasio efisiensi bersifat relatif, berarti DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE yang relatif terhadap sampel unit lain. Hal ini dapat digunakan untuk melihat unit ekonomi yang membutuhkan perbaikan manajerial atau yang membutuhkan perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan UKE yang tidak/kurang efisien
2. DEA menunjukkan unit ekonomi yang memiliki efisiensi sempurna dengan nilai 100% dan yang kurang efisien dengan nilai $<100\%$. jika suatu UKE kurang efisien (efisien $< 100\%$) maka DEA dapat menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (efficient reference set, efisiensi = 100%) dan seperangkat angka pengganda (multipliers) yang dapat digunakan oleh Instansi untuk menyusun strategi perbaikan atau angka multiplier yang digunakan sebagai dasar perbaikan manajerial.
3. DEA menyajikan matriks efisiensi silang yang dapat menunjukkan unit kegiatan ekonomi (UKE) efisiensi dengan input berbeda dan

menghasilkan ouput yang berbeda dengan unit kegiatan ekonomi (UKE) yang lain

3.5 Model Matematis DEA

3.5.1 Model Constant Return To Scale (CRS)

Model constant return to scale dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (Model CCR) pada tahun 1978. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output adalah sama (constant return to scale). Artinya, jika ada penambahan input sebesar x kali, maka output juga mengalami peningkatan sebesar x kali. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan atau Decision Making Unit (DMU) beroperasi pada skala yang optimal.

Rumus dari constant return to scale dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Max } \Theta & \text{ (Efisiensi DMU Model CRS)} \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} \lambda_j & \geq \theta x_{i0} \quad i = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{j=1}^n y_{rj} \lambda_j & \geq y_{r0} \quad r = 1, 2, \dots, s \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j & = 1 \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Di mana:

Θ = efisiensi teknis (CRS)

n = jumlah DMU

m = jumlah input

s = jumlah output

x_{ij} = jumlah input tipe ke- i dari DMU ke- j

y_{rj} = jumlah output tipe ke- r dari DMU ke- j

λ_j = bobot DMU j untuk DMU yang dihitung

Nilai efisiensi selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti inefisiensi, sedangkan DMU yang nilai efisiensinya sama dengan 1 berarti efisien.

3.5.2 Model Variable Return To Scale (VRS)

Model ini dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Cooper (model BCC) pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model sebelumnya yaitu, model CCR. Model ini beranggapan bahwa perusahaan belum beroperasi pada skala yang optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan input dan output jumlahnya tidak sama (variable return to scale). Artinya, tambahan input sebesar x kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x kali. Peningkatan proporsi dapat bersifat increasing return to scale (IRS) atau bersifat decreasing return to scale (DRS). Hasil model ini menambahkan kondisi convexity bagi nilai-nilai bobot, dengan memasukkan dalam model batasan berikut:

$$\sum x_j = 1 \quad n \quad j=1$$

Selanjutnya model BCC dapat ditulis dengan persamaan berikut:

Max (Efisiensi DMU Model VRS)

$$\sum = 1 x_{ij} 'i_j \geq x_{i0} n \quad j \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum = 1 y_{rj} 'j \geq y_{r0} n \quad j \quad r = 1, 2, \dots, j$$

$$\sum = 1 j' \geq 1 \quad n \quad j \quad (\text{VRS})$$

$$\sum = 1 'j \geq 0 \quad n \quad j \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Θ = efisiensi teknis (VRS)

n = jumlah DMU

m = jumlah input

s = jumlah output

x_{ij} = jumlah input ke- i dari DMU ke- j

y_{rj} = jumlah output ke- r dari DMU ke- j

θ_j = bobot DMU j untuk DMU yang dihitung

Nilai dari efisiensi tersebut selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti inefisiensi sedangkan DMU yang nilainya sama dengan 1 berarti efisien.

3.6 Efisiensi Skala

Pada umumnya suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) atau decision making unit (DMU), seperti contohnya industri tahu, memiliki karakteristik yang mirip satu sama lain. Namun, biasanya tiap industri tahu memiliki ragam dalam ukuran dan tingkat produksinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa ukuran industri tahu berperan penting dalam menentukan efisiensi atau inefisiensi relatifnya. Model CCR mencerminkan (perkalian) efisiensi teknis dan efisiensi skala, sedangkan model BCC mencerminkan efisiensi teknis saja, sehingga efisiensi skala relatif adalah rasio dari efisiensi model CCR dan model BCC.

$$Sk = qk,CCR / qk,BCC$$

Apabila terdapat perbedaan nilai efisiensi teknis antara model CRS dan VRS untuk satu unit tertentu maka hal ini mengindikasikan bahwa unit ini mengalami inefisiensi skala. Skala Efisiensi dapat dihitung dengan persamaan seperti diatas. Apabila nilai $Sk = 1$, hal ini mengindikasikan CRS, dan nilai $Sk < 1$ mengindikasikan terjadinya inefisiensi skala. Dengan demikian, untuk dapat

menentukan suatu unit beroperasi pada kondisi decreasing, increasing atau constant returns to scale diperlukan penghitungan nilai efisiensi teknis model CRS, VRS, dan efisiensi skalanya. Sedangkan untuk inefisiensi teknis dapat diketahui dari adanya slack atau radial movement baik terjadi pada input ataupun output.

3.7 Return to Scale (RTS)

Return to Scale (RTS) merupakan suatu ciri dari fungsi produksi yang memperlihatkan hubungan perbandingan perubahan semua input (dengan skala perubahan yang sama) terhadap perubahan Output yang diakibatkannya. Menurut (Soekartawi, 1994) terdapat tiga kondisi keadaan Return To Scale ini, yakni :

1. Decreasing Returns to Scale, bila $\sum b_i < 1$. Kondisi dimana proporsi penambahan masukan produksi melebihi proporsi penambahan produksi.
2. Constant Returns to Scale, bila $\sum b_i = 1$. Kondisi dimana penambahan masukan produksi akan proporsional dengan penambahan produksi.
3. Increasing Returns to Scale, bila $\sum b_i > 1$. Kondisi dimana proporsi penambahan masukan produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar

3.8 Keunggulan dan Kelemahan DEA

Dari uraian mengenai konsep Data Envelopment Analysis di atas, dan menurut Dr. Tim dalam Erwinta dan Nugroho (2005), maka terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan metode DEA, diantaranya adalah

3.8.1 Keunggulan

1. DEA dapat menangani pengukuran efisiensi secara relatif beberapa UKE (Unit Kegiatan Ekonomi) sejenis dengan menggunakan banyak input dan output.
2. Mampu mengidentifikasi sumber-sumber inefisiensi secara spesifik sehingga diperoleh informasi secara rinci pada masing-masing UKE
3. DEA dapat memberi arah pada UKE yang tidak efisien untuk meningkatkan efisiensinya melalui kegiatan benchmarking terhadap UKE yang efisien (Efficient Reference Set).
4. Dengan metode DEA, tidak perlu mencari asumsi bentuk fungsi hubungan antara variabel input dan output dari UKE sejenis yang akan diukur efisiensinya
5. Faktor input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda tanpa perlu melakukan perubahan satuan dari kedua variabel tersebut.

3.8.2 Kelemahan

1. Karena DEA merupakan sebuah *extremepoint technique*, kesalahan-kesalahan pengukuran dapat mengakibatkan masalah yang signifikan.
2. DEA hanyalah menunjukkan perbandingan baik buruk apa yang telah dilakukan sebuah UKE dibandingkan dengan sekumpulan UKE sejenis (relatif).

Karena DEA adalah teknik non parametrik, uji hipotesis secara statistik sulit dilakukan.



4.1 Analisis Data Deskriptif

Data yang digunakan merupakan data yang diambil dari tahun 2011-2015 dengan objek penelitian 4 (empat) daerah di Jawa Barat yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Data yang digunakan diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dan Pusdalisbang. Data yang digunakan untuk melihat pendapatan regional yang bertujuan menganalisa tingkat efisiensi keuangan daerah

menggunakan variabel input Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan variabel output yang digunakan untuk mengukur suatu perekonomian dengan menggunakan beberapa indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi suatu daerah yang dipungut sesuai peraturan daerah. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah.

Tabel 4. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Daerah di Jawa Barat

tahun	Daerah (ribu rupiah)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	834.595.865	291.062.396	94.606.169	116.677.729	334.235.539,75
2012	1.005.583.425	366.316.690	136.241.257	144.540.602	413.170.493,5

2013	1.442.775.239	507.243.684	187.170.467	191.599.456	582.197.211,5
2014	1.716.057.298	702.045.373	248.697.186	227.949.120	723.687.244,25
2015	1.859.694.644	784.216.215	314.621.269	268.816.074	806.837.050,5
rata-rata	1.371.741.294,2	530.176.871,6	196.267.269,6	189.916.596,2	572.025.507,9

Source Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data yang diperoleh seperti pada tabel 4.1 diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah di tiap daerah di Jawa Barat memiliki jumlah yang berbeda sesuai kebutuhan dan pengeluaran di tiap daerah itu sendiri. Daerah yang mempunyai nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi adalah Kota Bandung pada tahun 2011 dimana mencapai Rp834.595.865 meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp1.005.583.425. Akan tetapi pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, Kota Bandung mempunyai PAD lebih rendah dibandingkan rata-rata PAD dari tahun 2011 hingga 2015 sebesar Rp1.371.741.294,2. Kemudian Kota Bandung mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 sebesar Rp1.442.775.239 dan kembali meningkat pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar Rp1.716.057.298 dan Rp1.859.694.644. Penerimaan terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung berasal dari pajak daerah, salah satu jenis pajak penyumbang terbesar adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2011

sebesar Rp306.250.907 dan terus meningkat hingga tahun 2015 sebesar Rp488.000.000.

Kemudian, daerah yang mempunyai nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah adalah Kabupaten Bandung Barat dimana mencapai Rp94.606.169 dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar Rp136.241.257 kemudian mengalami kenaikan berturut-turut hingga tahun 2015 sebesar Rp187.170.467, Rp248.697.186, Rp314.621.269. Rata-rata PAD Kabupaten Bandung Barat pada rentang tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah Rp196.267.269,6. Kabupaten Bandung Barat hanya memiliki Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di tahun 2013 sebesar Rp100.000, maka dari itu menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat lebih rendah dibanding daerah lainnya yang memiliki kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Akan tetapi pada tahun 2015 Kabupaten Bandung Barat tidak lagi menjadi daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah. Pada tahun 2015, Kota Cimahi memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah yang mempunyai nominal Rp268.816.074. Kota Cimahi dari tahun 2011 juga terus mengalami peningkatan PAD dan mempunyai rata-rata sebesar Rp189.916.596,2. Untuk daerah Kabupaten Bandung mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp291.062.396, Rp366.316.690, Rp507.243.684, Rp702.045.373, Rp784.216.215 dan mempunyai rata-rata PAD sebesar Rp530.176.871,6.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 daerah di Jawa Barat tahun 2011 hingga tahun 2015 memiliki rata-rata keseluruhan sebesar Rp572.025.507,9, dimana hanya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang memiliki PAD diatas rata-rata.

4.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi. Berikut adalah data Dana Perimbangan di 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah.

Tabel 4. 2 Dana Perimbangan 4 daerah di Jawa Barat (2011-2015)

Tahun	Daerah (ribu rupiah)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	1.405.392.570	1.511.351.819	809.660.453	422.164.126	1.037.142.242
2012	1.807.075.186	1.954.099.528	977.452.867	541.183.364	1.319.952.736,25
2013	1.778.972.208	2.104.760.856	1.043.185.355	570.893.914	1.374.453.083,25
2014	1.886.016.264	2.261.962.786	1.494.604.202	625.419.291	1.567.000.635,75

2015	1.765.831.826	3.735.810.392	1.159.888.702	628.232.060	1.822.440.745
rata-rata	1.728.657.610,8	2.313.597.076,2	1.096.958.315,8	557.578.551	1.424.197.888,45

Source: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa Dana Perimbangan di beberapa daerah di Jawa Barat mengalami perubahan di setiap tahunnya, dibuktikan pada tahun 2011 Dana Perimbangan terbesar diperoleh Kabupaten Bandung sebesar Rp1.511.351.819, lalu meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp1.954.009.528, kemudian terus meningkat berturut-turut hingga tahun 2015 sebesar Rp2.104.760.856, Rp2.261.962.786, Rp3.735.810.392. Rata-rata PAD Kabupaten Bandung dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp2.313.597.076,2 yang juga merupakan rata-rata PAD paling tinggi dibanding 3 daerah lainnya. Adapun penerimaan terbesar Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah itu sendiri untuk menunjang keuangan daerah sehingga terlaksananya desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bandung berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp1.202.706.641, Rp1.518.230.253, Rp1.730.063.709, Rp1.897.769.300, Rp1.957.538.845. Adapun Dana Perimbangan terendah adalah Kota Cimahi. Sesuai luas wilayah, Kota Cimahi lebih kecil dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Hal ini dibuktikan Kota Cimahi hanya memiliki 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Sejalan dengan itu,

maka Kota Cimahi mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih rendah dibandingkan daerah lain. Sehingga dapat disimpulkan Dana Perimbangan Kota Cimahi memiliki nominal terendah. Pada tahun 2011, Kota Cimahi menerima Dana Perimbangan sebesar Rp422.164.126, kemudian tahun 2012 sebesar Rp541.183.364, tahun 2013 sebesar Rp570.893.914, tahun 2014 sebesar Rp625.419.291, dan tahun 2015 sebesar Rp628.232.060. Pada Kota Bandung, penerimaan Dana Perimbangan mengalami fluktuasi di tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp1.405.392.570, tahun 2012 sebesar Rp1.807.075.186, tahun 2013 sebesar Rp1.778.972.208, tahun 2014 sebesar Rp1.886.016.264 dan pada tahun 2015 sebesar Rp1.765.831.826. Rata-rata PAD Kota Cimahi dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp557.578.551 yang sangat jauh nominalnya dibandingkan rata-rata Dana Perimbangan di 3 daerah lainnya. Kemudian untuk Kabupaten Bandung Barat mempunyai Dana Perimbangan berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp809.660.453, Rp977.452.867, Rp1.043.185.355, Rp1.494.604.202, Rp1.159.888.702 dan rata-rata sebesar Rp1.096.958.315,8 yang masih berada dibawah rata-rata keseluruhan Dana Perimbangan 4 daerah di Jawa Barat tahun 2011 hingga tahun 2015.

Rata-rata keseluruhan Dana Perimbangan di 4 daerah di Jawa Barat pada tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp1.424.197.888,45, adapun hanya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung saja yang menerima Dana Perimbangan diatas rata-rata.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber diluar retribusi daerah, pajak daerah, maupun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikut adalah data Lain-Lain Pendapatan Yang Sah di 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015:

**Tabel 4. 3 Lain-Lain Pendapatn Yang Sah 4 Daerah di Jawa Barat
(2011-2015)**

Tahun	Daerah (ribu rupiah)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	875.308.088	140.494.956	87.853.711	138.935.575	310.648.082,5
2012	854.034.799	103.201.045	72.383.936	186.828.596	304.112.094
2013	1.110.341.500	136.250.840	441.006.518	212.856.825	475.113.920,75
2014	1.351.867.067	1.074.769.667	401.229.408	263.765.853	772.907.998,75
2015	1.472.545.447	3.775.740.893	701.316.892	289.747.755	1.559.837.746,75

rata-rata	1.132.819.380,2	1.046.091.480,2	340.758.093	218.426.920,8	684.523.968,55

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa setiap daerah menerima Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang dipengaruhi dari beberapa sektor seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke daerah lainnya, dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian otonomi khusus dan lainnya. Daerah yang menerima lain-lain pendapatan yang sah terbesar ialah Kota Bandung, dibuktikan pada tahun 2011 Kota Bandung menerima lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp875.308.088, kemudian pada tahun 2012 meningkat mencapai Rp854.034.799 dan terus meningkat berturut-turut hingga tahun 2015 sebesar Rp1.110.341.500, Rp1.351.867.067, Rp1.472.545.447. Rata-rata lain-lain pendapatan yang sah Kota Bandung tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp1.132.819.380,2.

Daerah yang menerima lain-lain pendapatan yang sah terendah ialah Kabupaten Bandung Barat, dibuktikan pada tahun 2011 dan 2012 menerima lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp87.853.711 dan Rp72.383.936. Akan tetapi pada tahun 2013 hingga tahun 2015 Kabupaten Bandung Barat tidak lagi menjadi penerima lain-lain pendapatan yang sah terendah karena mengalami peningkatan nominal yang cukup tinggi berturut-turut sebesar Rp441.006.518, Rp401.229.408, dan Rp701.316.892. Rata-rata keseluruhan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp340.758.093.

Kemudian Kota Cimahi pada tahun 2011 menerima lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp138.935.575, dan pada tahun 2012 sebesar Rp186.828.596. Kemudian pada tahun 2013 hingga tahun 2015, Kota Cimahi menjadi daerah yang menerima lain-lain pendapatan yang sah terendah menggantikan Kabupaten Bandung Barat, dibuktikan berturut-turut penerimaan lain-lain pendapatan yang sah Kota Cimahi tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp212.856825, Rp263.765.853, Rp289.747.755 dan mendapatkan rata-rata keseluruhan lain-lain pendapatan yang sah Kota Cimahi tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp218.426.920,8 yang juga menandakan bahwa Kota Cimahi berada di posisi terendah dibandingkan rata-rata 3 daerah lainnya. Kemudian Kabupaten Bandung menerima lain-lain pendapatan yang sah berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp140.494.956, Rp103.201.045, Rp136.250.840, Rp1.074.769.667, Rp3.775.740.893. Maka, rata-rata lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Bandung tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar Rp1.046.091.480,2.

4.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator suatu daerah yang menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari periode tertentu ke periode sebelumnya. Berikut adalah data yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 4. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi 4 daerah di Jawa Barat (2011-2015)

tahun	Daerah (dalam persentase)				
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	rata-rata
2011	8,73%	5,94%	5,75%	5,5%	6,48%
2012	8,98%	6,15%	6,04%	6,24%	6,85%
2013	8,87%	5,92%	5,94%	5,65%	6,59%
2014	7,71%	5,91%	5,71%	5,49%	6,21%
2015	7,63%	5,89%	5,01%	5,43%	5,99%
rata-rata	8,35%	5,96%	5,69%	5,67%	6,42%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 4.4 data yang diperoleh merupakan laju pertumbuhan ekonomi di 4 daerah di Jawa Barat tahun 2011 hingga tahun 2015. Diketahui bahwa setiap daerah mengalami fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya, adapun Kota Bandung pada tahun 2011 mencapai 8,73% dan mengalami kenaikan menjadi 8,98% dikarenakan kenaikan pada beberapa lapangan usaha seperti

bangunan, listrik, perdagangan, komunikasi, dan keuangan. Namun, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terus mengalami penurunan di tahun 2013 hingga tahun 2015 sebesar 8,87%, 7,71%, 7,63% yang disebabkan menurunnya lapangan usaha pengadaan listrik dan perusahaan jasa baik pemerintah maupun swasta yang cukup tinggi.

Daerah yang mempunyai laju pertumbuhan terendah adalah Kota Cimahi, dibuktikan pada tahun 2011 mencapai 5,5%, kemudian meningkat menjadi 6,24%. Akan tetapi pada tahun 2013 hingga 2015 terus mengalami penurunan berturut-turut sebesar 5,65%, 5,49%, 5,43% yang disebabkan oleh beberapa lapangan usaha seperti informasi dan komunikasi pada tahun 2015 mencapai 17,59% yang mengalami penurunan sebesar 0,9% dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk Kabupaten Bandung juga mengalami fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi, dibuktikan pada tahun 2011 sebesar 5,94% lalu mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 6,15%. pada tahun 2013 hingga tahun 2015, Kabupaten Bandung mengalami penurunan laju pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,92%, 5,91%, 5,01% dan mempunyai rata-rata sebesar 5,96%, maka menunjukkan Kabupaten Bandung berada dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di 4 daerah di Jawa Barat. Untuk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami peningkatan dimana laju pertumbuhan sebesar 5,5% menjadi 6,24%. Namun pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami penurunan dimana laju pertumbuhan berturut-turut sebesar 5,94%, 5,71%, 5,01% dan mempunyai rata-rata sebesar 5,69% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat berada dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di 4 daerah di Jawa Barat.

4.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur penduduk dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya untuk membangun kualitas hidup masyarakat di suatu negara/daerah. Berikut adalah data yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi. Data dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia di 4 Daerah di Jawa Barat (2011-2015)

tahun	Daerah (dalam persentase)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	78,13%	67,78%	62,36%	74,41%	70,67%
2012	78,30%	68,13%	63,17%	74,99%	71,15%
2013	78,55%	68,58%	63,93%	75,85%	71,73%
2014	78,98%	69,05%	64,27%	76,06%	72,09%
2015	79,67%	70,05%	65,23%	76,02%	72,75%

rata-rata	78,73%	68,72%	65,24%	75,47%	71,84%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada tabel 4.5, menunjukkan besar IPM di tiap daerah tidak terlampau jauh berbeda. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM adalah Angka Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup. Kota Bandung mempunyai IPM tertinggi dibanding daerah lainnya, dibuktikan pada tahun 2011 sebesar 78,13% kemudian meningkat pada tahun 2012 sebesar 78,30% dan terus meningkat pada tahun 2013 hingga tahun 2015 berturut-turut sebesar 78,55%, 78,98%, 79,67%, dengan rata-rata keseluruhan sebesar 78,73% yang menunjukkan Kota Bandung berada diatas rata-rata IPM di 4 daerah di Jawa Barat tahun 2011 hingga tahun 2015.

Daerah yang mempunyai capaian IPM terendah adalah Kabupaten Bandung Barat, yaitu pada tahun 2011 sebesar 62,36% kemudian terus meningkat berturut-turut hingga tahun 2015 sebesar 63,17%, 63,93%, 64,27%, 65,23% dengan rata-rata sebesar 65,24% dimana menunjukkan Kabupaten Bandung Barat berada dibawah rata-rata keseluruhan IPM 4 daerah di Jawa Barat selama 5 tahun. Untuk daerah Kabupaten Bandung juga memiliki capaian IPM yang terus meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015 berturut-turut sebesar 67,78%, 68,13%, 68,58%, 69,05%, 70,05% dengan rata-rata sebesar 68,72%, yang menunjukkan Kabupaten Bandung berada dibawah rata-rata keseluruhan IPM 4 daerah di Jawa Barat selama 5 tahun. Kemudian Kota Cimahi selama 4 tahun berturut-turut memiliki capaian

IPM yang terus meningkat sebesar 74,41%, 74,99%, 75,85%, 76,06% namun menurun di tahun 2015 sebesar 76,02%, dengan rata-rata sebesar 75,47% yang menunjukkan Kota Cimahi berada diatas rata-rata keseluruhan IPM 4 daerah di Jawa Barat dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

4.2 Pemilihan Model Uji Efisiensi

Model uji efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini dapat menggunakan 2 asumsi model yakni:

1. Constant Return To Scale, diasumsikan penambahan input akan sebanding dengan output yang dihasilkan dengan DMU berada pada kondisi yang optimal
2. Variable Return To Scale, diasumsikan sebagai penambahan input yang menghasilkan output yang berbeda sehingga menghasilkan kenaikan efisiensi atau penurunan efisiensi.

Pada penelitian efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung ini lebih tepat menggunakan asumsi Variable Return To Scale dengan alasan bahwa penggunaan input variabel pendapatan regional menghasilkan variabel output yang menunjukkan tingkat efisiensi 4 daerah di Jawa Barat yang mengalami kenaikan atau penurunan. Sehingga, kurang tepat jika penelitian ini menggunakan asumsi Constant Return To Scale karena pada kasus ini DMU tidak berada di kondisi optimal.

4.3 Hasil Pengujian

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian adalah DEA dengan menggunakan software DEAP version 2.1, dimana menggunakan

asumsi Variable Return To Scale yang berorientasi pada pendekatan input. Berdasarkan hasil penelitian efisiensi menggunakan DEA, berikut tingkat efisiensi pada masing-masing variabel input dan variabel output pada 4 daerah di Jawa Barat yaitu:

Tabel 4. 6 Hasil Olah Data Kota Bandung 2011-2015

Tahun	Tingkat Efisiensi
2011	1.000
2012	1.000
2013	1.000
2014	1.000
2015	1.000

Sumber: Olah data dengan DEAP 2.1

Berdasarkan tabel 4.6 hasil olah data efisiensi Kota Bandung periode 2011-2015 menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan daerah Kota Bandung yaitu PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai input terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM sebagai output secara teknis mencapai efisiensi dengan nominal 1.000.

Tabel 4. 7 Hasil Olah Data Kabupaten Bandung 2011-2015

Tahun	Tingkat Efisiensi
2011	0.583
2012	1.000
2013	1.000
2014	0.613

2015	0.767
------	-------

Sumber: Olah data dengan DEAP 2.1

Berdasarkan tabel 4.7 hasil olah data efisiensi Kabupaten Bandung periode 2011-2015 menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Bandung terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM secara teknis terjadi efisiensi di tahun 2012 dan 2013, sedangkan inefisiensi di tahun 2011, 2014, dan 2015, dibuktikan pada tahun 2011 sebesar 0,583, tahun 2012 sebesar 1.000, tahun 2013 sebesar 1.000, tahun 2014 sebesar 0,613, dan tahun 2015 sebesar 0,767.

Tabel 4. 8 Inefisiensi Kabupaten Bandung 2011-2015

TAHUN	TINGKAT EFISIENSI	ORIGINAL VALUE	PROJECTED VALUE	RADIAL MOVEMENT	SLACK MOVEMENT
2011	0,583				
PAD		291062396.000	169565717332	121496678.668	0.000
DP		1511351819.000	736225708.256	630875815.053	14425095.691
LLPS		1404949566.000	76730534.268	586460869.942	641758161.790
PDRB		5.940	5.940	0.000	0.000
IPM		67.780	67.780	0.000	0.000
2014	0.613				
PAD		702045373.000	430252125.477	271793247.523	0.000
DP		2261962786.000	1329247821.674	875707233.501	57007730.824
LLPS		1074769667.000	136250840.000	416091536.768	170527290.900
PDRB		5.910	5.910	0.000	0.000
IPM		69.060	69.060	0.000	0.000
2015	0.767				
PAD		784216215.000	601454320.455	182761894.545	0.000
DP		3735810392.000	866093829.255	870632067.847	*
LLPS		3775740893.000	537059999.691	879937886.667	*
PDRB		5.980	5.890	0.000	0.000
IPM		70.050	77.100	0.000	7.050

Sumber: hasil olah data

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Bandung terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM mengalami Inefisiensi yang terjadi pada tahun 2011, input PAD mengalami radial movement sebesar 121496678,668, agar efisien maka Kabupaten Bandung perlu meningkatkan PAD sebesar Rp121.496.678,668. Input dana perimbangan juga mengalami radial movement

sebesar 630875815,053 dan slack movement sebesar 144250295,691, dimana menunjukkan perlunya penambahan dana perimbangan sebesar Rp 630.875.815,053 dan pengurangan dana yang kurang perlu sebesar Rp 144.250.295,691. Pada input lain-lain pendapatan yang sah mengalami radial movement sebesar 586460869,942 dan slack movement sebesar 641758161,790, dimana menunjukkan perlunya penambahan input sebesar Rp 586.460.869,942 dan pengurangan hal yang kurang perlu sebesar Rp 641.758.161,790.

Kemudian inefisiensi pada tahun 2014, input PAD mengalami radial movement sebesar 271793247,523 atau perlunya penambahan PAD sebesar Rp271.793.247,523. Lalu pada input dana perimbangan juga mengalami radial movement sebesar 875707233,501 atau perlunya penambahan dana sebesar Rp875.707.233,501 dan mengalami slack movement sebesar 57007730,824 yang dimana menunjukkan pengurangan dana yang kurang perlu sebesar Rp57.007.730,824. Kemudian input lain-lain pendapatan yang sah mengalami radial movement dan slack movement sebesar 416091536,768 dan 170527290,900 artinya perlunya penambahan dana sebesar Rp416.091.536,768 dan pengurangan dana yang kurang perlu sebesar Rp170.527.290,900.

Inefisiensi pada tahun 2015, output IPM mengalami slack movement sebesar 7,050 yang menunjukkan perlunya peningkatan nominal sebesar 7,050. Pada input PAD mengalami radial movement sebesar 182761894,545 artinya perlu peningkatan sebesar Rp182.761.894,545. Input dana perimbangan juga mengalami radial movement sebesar 870632067,847 dan mengalami slack movement, yang menandakan pemborosan pada penggunaan PAD. Kemudian lain-lain pendapatan

yang sah mengalami radial movement sebesar 879937886,667 yang artinya perlu peningkatan pendapatan sebesar Rp879.937.886,667. Adapun input dana perimbangan juga mengalami slack movement yang menandakan adanya pemborosan, sehingga perlunya pengurangan nominal pada input lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 4. 9 Hasil Olah Data Kabupaten Bandung Barat 2011-2015

Tahun	Tingkat Efisiensi
2011	1.000
2012	1.000
2013	1.000
2014	1.000
2015	0.584

Sumber: Olah data dengan DEAP 2.1

Berdasarkan tabel 4.9 hasil olah data efisiensi Kabupaten Bandung Barat periode 2011-2015 menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM secara teknis terjadi efisiensi di tahun 2011 hingga 2014 sebesar 1.000, sedangkan inefisiensi di tahun 2015 sebesar 0.584.

Tabel 4. 10 Inefisiensi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015

TAHUN	TINGKAT EFISIENSI	ORIGINAL VALUE	PROJECTED VALUE	RADIAL MOVEMENT	SLACK MOVEMENT
2015	0.854				
PAD		314621269.000	268816074.000	45805195.000	0.000
DP		1159888702.000	628232060.000	168866295.474	362790346.526
LLPS		1159888702.000	289747755.000	102103577.094	309465559.906
PDRB		5.010	5.430	0.000	0.420
IPM		65.230	76.420	0.000	11.190

Sumber: hasil olah data

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM pada tahun 2015 mengalami inefisiensi, dibuktikan pada output laju pertumbuhan ekonomi mengalami slack movement sebesar 0,420 yang menunjukkan perlunya peningkatan nominal laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,420. Kemudian pada output IPM juga mengalami slack movement sebesar 11,190 yang menunjukkan perlunya peningkatan nominal IPM sebesar 11,190. Pada input PAD mengalami radial movement sebesar 45805195,000, dimana perlunya penambahan pendapatan sebesar Rp45.805.195,000 untuk mencapai efisiensi. Selanjutnya pada input dana perimbangan mengalami radial movement sebesar 168866295,474, artinya perlu penambahan nominal input sebesar Rp168.866.295,474 untuk mencapai nilai yang efisien. Pada input dana perimbangan juga mengalami slack movement sebesar 362790346,526, artinya perlu mengurangi nominal dana yang bersifat konsumtif sebesar Rp362.790.346,526. Kemudian pada input lain-lain pendapatan yang sah mengalami radial movement sebesar 102103577,094, artinya perlu penambahan nominal pendapatan sebesar Rp102.103.577,094. Slack movement juga terjadi pada input lain-lain pendapatn yang sah sebesar 309465559,906, menunjukkan bahwa perlunya pengurangan jumlah pendapatan yang kurang diperlukan sebesar Rp309.465.559,906.

Tabel 4. 11 Hasil Olah Data Kota Cimahi 2011-2015

Tahun	Tingkat Efisiensi
2011	1.000
2012	1.000

2013	1.000
2014	1.000
2015	1.000

Sumber: Olah data dengan DEAP 2.1

Berdasarkan tabel 4.6 hasil olah data efisiensi Kota Cimahi periode 2011-2015 menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan daerah Kota Bandung yaitu PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai input terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM sebagai output secara teknis mencapai efisiensi dengan nominal 1.000.

4.4 Pembahasan

Tabel 4. 12 Nilai Efisiensi 4 Daerah di Jawa Barat Tahun 2011-2015

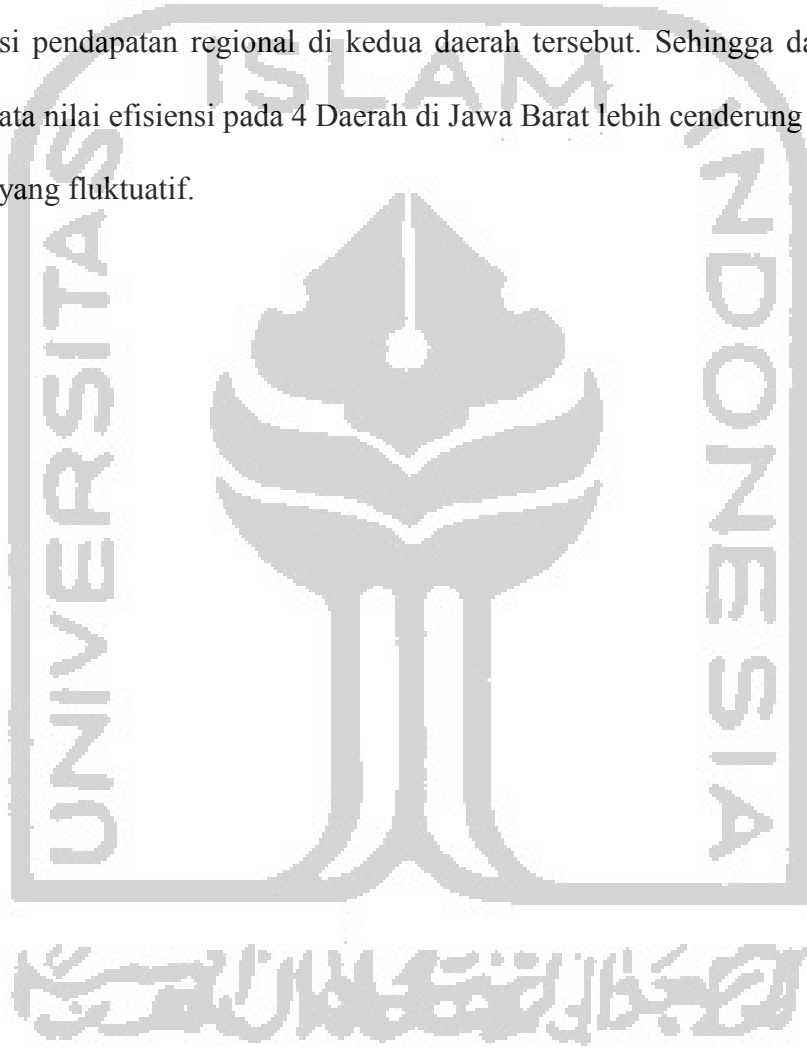
Tahun	Daerah				Rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	1,000	0,583	1,000	1,000	0.895
2012	1,000	1,000	1,000	1,000	1.000
2013	1,000	1,000	1,000	1,000	1.000
2014	1,000	0,613	1,000	1,000	0.903
2015	1,000	0,767	0,854	1,000	0.905

Sumber: data diolah menggunakan DEAP 2.1

Berdasarkan pada tabel 4.12, menunjukkan nilai efisiensi keseluruhan di 4 Daerah di Jawa Barat periode 2011 hingga 2015 dalam pengalokasian pendapatan regional berupa PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM. Diketahui bahwa Kota Bandung tahun 2011 hingga 2015 menghasilkan nilai efisiensi sebesar 1.000 yang menunjukkan bahwa pengalokasian pendapatan regional dalam mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi yang baik dan kesejahteraan masyarakat sudah tepat sasaran dan optimal. Kemudian Kabupaten Bandung menghasilkan efisiensi relatif sebesar 1.000 hanya pada tahun 2012 dan 2013, sedangkan pada tahun 2011, 2014, dan 2015 menghasilkan inefisiensi sebesar 0.583, 0.613, 0.767, dimana menunjukkan belum optimalnya pengalokasian pendapatan regional dan pengembangan SDA pada Kabupaten Bandung, sehingga tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum sesuai yang diharapkan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 hingga 2014 dapat dilihat menghasilkan efisiensi relatif sebesar 1.000, namun pada tahun 2015 menghasilkan inefisiensi sebesar 0,854. Hal ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam efisiensi penggunaan pendapatan regional Kabupaten Bandung Barat. Kemudian Kota Cimahi tahun 2011 hingga 2015 menghasilkan efisiensi relatif sebesar 1.000 yang menunjukkan konsistensi dan optimalisasi penggunaan pendapatan regional terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM.

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa 4 Daerah di Jawa Barat mempunyai ciri konsistensi dalam menghasilkan tingkat efisiensi yang berbeda. Pada Kota Bandung dan Kota Cimahi periode 2011 hingga 2015, kedua daerah tersebut

konsisten dalam menjaga tingkat efisiensi relatif, sehingga cenderung terus menghasilkan tingkat efisiensi relatif hingga beberapa tahun kedepan. Namun pada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, lebih cenderung mengalami fluktuasi di tiap tahunnya dalam menghasilkan tingkat efisiensi relatif dalam alokasi pendapatan regional di kedua daerah tersebut. Sehingga dapat diketahui rata-rata nilai efisiensi pada 4 Daerah di Jawa Barat lebih cenderung menghasilkan hasil yang fluktuatif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan DEAP 2.1 terhadap tingkat efisiensi penerimaan pendapatan daerah 4 daerah di Jawa Barat yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi tahun 2011 hingga tahun 2015, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji menggunakan DEA pada 4 daerah di Jawa Barat, terdapat 2 daerah yang menghasilkan tingkat efisiensi relatif sebesar 1.000 yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi.
2. Berdasarkan hasil uji menggunakan DEA pada 4 daerah di Jawa Barat, terdapat 2 daerah lain yang menghasilkan tingkat efisien tidak relatif atau dibawah 1.000 yaitu Kabupaten Bandung pada tahun 2011, 2014, 2015 dan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015. Terjadinya inefisiensi pada kedua daerah tersebut disebabkan oleh pemerintah daerah yang belum mengelola pendapatan regional secara optimal yang menyebabkan terjadinya pemborosan, sehingga dalam mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum tepat sasaran.

5.2 Implikasi

Daerah yang mencapai tingkat efisiensi relatif 1,000 atau 1% diharapkan untuk tetap mempertahankan pencapaiannya. Sedangkan bagi daerah yang memiliki tingkat efisiensi dibawah relatif 1,000 atau 1% diharapkan untuk menjaga

penggunaan pendapatan regionalnya secara optimal dan tepat sasaran terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan IPM agar bisa mencapai tingkat efisiensi 1,000 atau 1%, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2013, Juni). Hubungan Jumlah Wisatawan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *Jurnal Emba*, 1(3), 664-672.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Kota Bandung Dalam Angka 2012*. Bandung: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kota Bandung Dalam Angka 2013*. Bandung: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kota Bandung Dalam Angka 2014*. Bandung: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kota Bandung Dalam Angka 2016*. Bandung: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2012*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2013*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2014*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2016*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Dalam Angka 2012*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Dalam Angka 2013*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Dalam Angka 2014*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kabupaten Bandung Dalam Angka 2016*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kota Cimahi Dalam Angka 2012*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kota Cimahi Dalam Angka 2013*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kota Cimahi Dalam Angka 2014*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Kota Cimahi Dalam Angka 2016*. BPS.

- Hartawan, T. (2017, Mei 5). *BPS: Sektor Informasi Komunikasi Penyumbang Ekonomi Tertinggi*. Jakarta: Tempo.
- Hertanto, I., & Sriyana, J. (2011). Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota. *12*(1).
- Hukum Online. (2016, Mei 3). *Empat Catatan Terkait Perda Penghambat Investasi di Daerah*. Retrieved agustus 5, 2019, from <https://hukumonline.com/berita/baca/lt57289fcf75b4c/>
- Kemendagri. (2012). *Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 Tentang izin gangguan dan retribusi Izin Gangguan*. Retrieved Agustus 5, 2019, from https://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BANDUNG_19_2012.pdf
- Kemenkeu. (2004). *Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Retrieved Juli 17, 2019, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=367>
- Kemenkeu. (n.d.). *Dana Alokasi Umum*. Retrieved Agustus 6, 2019, from <https://www.dipk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pdf>
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- PPID Kota Bandung. (n.d.). *PDRB Kota Bandung 2011-2015*. Retrieved Agustus 6, 2019, from <https://www.ppid.bandung.go.id>
- PPID Kota Bandung. (n.d.). *PDRB Kota Bandung Menurut lapangan Usaha 2011-2015*. Bandung: BPS.
- RI, D. (2004). *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Retrieved Juli 18, 2019, from www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf
- RI, D. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*. Retrieved Agustus 7, 2019, from <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Rosmaniar. (2012, Juni). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan. *Ekonomi dan Studi Pembangunan*, *1*(1).
- Rusydi, D. S., Wardani, D. K., & Totalia, S. A. (2015). Analisis Efisiensi Relatif Penggunaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012.
- S. K. (2015). *Rincian Alokasi DAU TA 2015*. Retrieved Agustus 6, 2019, from <https://www.sipuu.setkab.go.id/>
- Saqia, D. P. (2016). Analisis Perbandingan BPHTB Sebelum dan Sesudah Menjadi Pajak Daerah Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *1*(1).



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 Daerah di Jawa Barat (2011-2015)

tahun	Daerah (ribu rupiah)				
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	rata-rata
2011	834.595.865	291.062.396	94.606.169	116.677.729	334.235.539,75
2012	1.005.583.425	366.316.690	136.241.257	144.540.602	413.170.493,5
2013	1.442.775.239	507.243.684	187.170.467	191.599.456	582.197.211,5
2014	1.716.057.298	702.045.373	248.697.186	227.949.120	723.687.244,25
2015	1.859.694.644	784.216.215	314.621.269	268.816.074	806.837.050,5
rata-rata	1.371.741.294,2	530.176.871,6	196.267.269,6	189.916.596,2	572.025.507,9

Sumber: Badan Pusat Statistik

LAMPIRAN 2. Dana Perimbangan 4 daerah di Jawa Barat

(2011-2015)

tahun	Daerah (miliar rupiah)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	1.405.392.570	1.511.351.819	809.660.453	422.164.126	1.037.142.242
2012	1.807.075.186	1.954.099.528	977.452.867	541.183.364	1.319.952.736,25
2013	1.778.972.208	2.104.760.856	1.043.185.355	570.893.914	1.374.453.083,25
2014	1.886.016.264	2.261.962.786	1.494.604.202	625.419.291	1.567.000.635,75
2015	1.765.831.826	3.735.810.392	1.159.888.702	628.232.060	1.822.440.745
rata-rata	1.728.657.610,8	2.313.597.076,2	1.096.958.315,8	557.578.551	1.424.197.888,45

Sumber: Badan Pusat Statistik

**LAMPIRAN 3. Lain-Lain Pendapatn Yang Sah 4 Daerah di Jawa Barat
(2011-2015)**

tahun	Daerah (miliar rupiah)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	875.308.088	140.494.956	87.853.711	138.935.575	310.648.082,5
2012	854.034.799	103.201.045	72.383.936	186.828.596	304.112.094
2013	1.110.341.500	136.250.840	441.006.518	212.856.825	475.113.920,75
2014	1.351.867.067	1.074.769.667	401.229.408	263.765.853	772.907.998,75
2015	1.472.545.447	3.775.740.893	701.316.892	289.747.755	1.559.837.746,75
rata-rata	1.132.819.380,2	1.046.091.480,2	340.758.093	218.426.920,8	684.523.968,55

Sumber: Badan Pusat Statistik

**LAMPIRAN 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4 daerah di Jawa Barat
(2011-2015)**

tahun	Daerah (dalam persentase)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	8,73%	5,94%	5,75%	5,5%	6,48%
2012	8,98%	6,15%	6,04%	6,24%	6,85%
2013	8,87%	5,92%	5,94%	5,65%	6,59%
2014	7,71%	5,91%	5,71%	5,49%	6,21%
2015	7,63%	5,89%	5,01%	5,43%	5,99%
rata-rata	8,35%	5,96%	5,69%	5,67%	6,42%

Sumber: Badan Pusat Statistik

LAMPIRAN 5. Indeks Pembangunan Manusia di 4 Daerah di Jawa

Barat (2011-2015)

tahun	Daerah (dalam persentase)				rata-rata
	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi	
2011	78,13%	67,78%	62,36%	74,41%	70,67%
2012	78,30%	68,13%	63,17%	74,99%	71,15%
2013	78,55%	68,58%	63,93%	75,85%	71,73%
2014	78,98%	69,05%	64,27%	76,06%	72,09%
2015	79,67%	70,05%	65,23%	76,02%	72,75%
rata-rata	78,73%	68,72%	65,24%	75,47%	71,84%

Sumber: Badan Pusat Statistik

LAMPIRAN 6. Inefisiensi Kabupaten Bandung 2011-2015

TAHUN	TINGKAT EFISIENSI	ORIGINAL VALUE	PROJECTED VALUE	RADIAL MOVEMENT	SLACK MOVEMENT
2011	0,583				
PAD		291062396.000	169565717332	121496678.668	0.000
DP		1511351819.000	736225708.256	630875815.053	14425095.691
LLPS		1404949566.000	76730534.268	586460869.942	641758161.790
PDRB		5.940	5.940	0.000	0.000
IPM		67.780	67.780	0.000	0.000
2012	1.000				
PAD		366316690.000	366316690.000	0.000	0.000
DP		1954099528.000	1954099528.000	0.000	0.000
LLPS		103201045.000	103201045.000	0.000	0.000
PDRB		6.150	6.150	0.000	0.000
IPM		68.130	68.130	0.000	0.000
2013	1.000				
PAD		507243684.000	507243684.000	0.000	0.000
DP		2104760856.000	2104760856.000	0.000	0.000
LLPS		136250840.000	136250840.000	0.000	0.000
PDRB		5.920	5.920	0.000	0.000
IPM		68.580	68.580	0.000	0.000
2014	0.613				
PAD		702045373.000	430252125.477	271793247.523	0.000
DP		2261962786.000	1329247821.674	875707233.501	57007730.824
LLPS		1074769667.000	136250840.000	416091536.768	170527290.900
PDRB		5.910	5.910	0.000	0.000
IPM		69.060	69.060	0.000	0.000
2015	0.767				
PAD		784216215.000	601454320.455	182761894.545	0.000
DP		3735810392.000	866093829.255	870632067.847	*
LLPS		3775740893.000	537059999.691	879937886.667	*
PDRB		5.980	5.890	0.000	0.000
IPM		70.050	77.100	0.000	7.050

LAMPIRAN 7. Inefisiensi Kabupaten Bandung Barat 2011-2015

TAHUN	TINGKAT EFISIENSI	ORIGINAL VALUE	PROJECTED VALUE	RADIAL MOVEMENT	SLACK MOVEMENT
2011	1.000				
PAD		94606169.000	94606169.000	0.000	0.000
DP		809660453.000	809660453.000	0.000	0.000
LLPS		87853711.000	87853711.000	0.000	0.000
PDRB		5.750	5.750	0.000	0.000
IPM		62.360	62.360	0.000	0.000
2012	1.000				
PAD		136241257.000	136241257.000	0.000	0.000
DP		977452867.000	977452867.000	0.000	0.000
LLPS		72383936.000	72383936.000	0.000	0.000
PDRB		6.040	6.040	0.000	0.000
IPM		63.170	63.170	0.000	0.000
2013	1.000				
PAD		187170467.000	187170467.000	0.000	0.000
DP		1043185355.000	1043185355.000	0.000	0.000
LLPS		441006518.000	441006518.000	0.000	0.000
PDRB		5.940	5.940	0.000	0.000
IPM		63.930	63.930	0.000	0.000
2014	1.000				
PAD		248697186.000	248697186.000	0.000	0.000
DP		1494604202.000	1494604202.000	0.000	0.000
LLPS		401229408.000	401229408.000	0.000	0.000
PDRB		5.710	5.710	0.000	0.000
IPM		64.270	64.270	0.000	0.000
2015	0.854				
PAD		314621269.000	268816074.000	45805195.000	0.000
DP		1159888702.000	628232060.000	168866295.474	362790346.526
LLPS		1159888702.000	289747755.000	102103577.094	309465559.906
PDRB		5.010	5.430	0.000	0.420
IPM		65.230	76.420	0.000	11.190

LAMPIRAN 8. Efisiensi Kabupaten Bandung

Results for firm: 1 (2011)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.477 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	8.730	0.000	0.000	8.730
output 2	78.130	0.000	0.000	78.130
input 1	834595865.000	0.000	0.000	834595865.000
input 2	1405392570.000	0.000	0.000	1405392570.000
input 3	875308088.000	0.000	0.000	875308088.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
1	1.000	

Results for firm: 1 (2012)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.431 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	8.980	0.000	0.000	8.980
output 2	78.300	0.000	0.000	78.300
input 1	1005583425.000	0.000	0.000	1005583425.000
input 2	1807075186.000	0.000	0.000	1807075186.000
input 3	854034799.000	0.000	0.000	854034799.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
1	1.000	

Results for firm: 1 (2013)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	8.870	0.000	0.000	8.870
output 2	78.550	0.000	0.000	78.550
input 1	1442775239.000	0.000	0.000	1442775239.000
input 2	1778972208.000	0.000	0.000	1778972208.000
input 3	110341500.000	0.000	0.000	110341500.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
1	1.000	

Results for firm: 1 (2014)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.466 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original	radial	slack	projected
	value	movement	movement	value
output 1	7.710	0.000	0.000	7.710
output 2	78.980	0.000	0.000	78.980
input 1	1716057298.000	0.000	0.000	1716057298.000
input 2	1886016264.000	0.000	0.000	1886016264.000
input 3	1351867067.000	0.000	0.000	1351867067.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
1	1.000	

Results for firm: 1 (2015)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.500 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original	radial	slack	projected
	value	movement	movement	value
output 1	7.630	0.000	0.000	7.630
output 2	79.670	0.000	0.000	79.670
input 1	1859694644.000	0.000	0.000	1859694644.000
input 2	1765831826.000	0.000	0.000	1765831826.000
input 3	1472545447.000	0.000	0.000	1472545447.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
1	1.000	

Sumber: Data diolah menggunakan DEAP 2.1

LAMPIRAN 9. Efisiensi Kabupaten Bandung

Results for firm: 2 (2011)

Technical efficiency = 0.583

Scale efficiency = 0.680 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	5.940	0.000	0.000	5.940
output 2	67.780	0.000	0.000	67.780
input 1	291062396.000	-121496678.668	0.000	169565717.332
input 2	1511351819.000	-630875815.053	-144250295.691	736225708.256
input 3	1404949566.000	-586460869.942	-641758161.790	76730534.268

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Results for firm: 2 (2012)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.756 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	6.150	0.000	0.000	6.150
output 2	68.130	0.000	0.000	68.139
input 1	366316690.000	0.000	0.000	366316690.000
input 2	1954099528.000	0.000	0.000	1954099528.000
input 3	103201045.000	0.000	0.000	103201045.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Results for firm: 2 (2013)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	5.920	0.000	0.000	5.920
output 2	68.580	0.000	0.000	68.580
input 1	507243684.000	0.000	0.000	507243684.000
input 2	2104760856.000	0.000	0.000	2104760856.000
input 3	136250840.000	0.000	0.000	136250840.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Results for firm: 2 (2014)
 Technical efficiency = 0.613
 Scale efficiency = 0.570 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	5.910	0.000	0.000	5.910
output 2	69.060	0.000	0.000	69.060
input 1	702045373.000	-271793247.523	0.000	430252125.477
input 2	2261962786.000	-875707233.501	-57007730.824	1329247821.674
input 3	1074769667.000	-416091536.768	-170527290.900	136250840.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Results for firm: 2 (2015)
 Technical efficiency = 0.767
 Scale efficiency = 0.485 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	5.890	0.000	0.000	5.890
output 2	70.050	0.000	7.050	77.100
input 1	784216215.000	-182761894.545	0.000	601454320.455
input 2	3735810392.000	-870632067.847	*****	866093829.255
input 3	3775740893.000	-879937886.667	*****	537059999.691

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Sumber: Data diolah menggunakan DEAP 2.1

LAMPIRAN 10. Efisiensi Kabupaten Bandung Barat

Results for firm: 3 (2011)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original	radial	slack	projected
	value	movement	movement	value
output 1	5.750	0.000	0.000	5.750
output 2	62.360	0.000	0.000	62.360
input 1	94606169.000	0.000	0.000	94606169.000
input 2	809660453.000	0.000	0.000	809660453.000
input 3	87853711.000	0.000	0.000	87853711.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	1.000	

Results for firm: 3 (2012)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original	radial	slack	projected
	value	movement	movement	value
output 1	6.040	0.000	0.000	6.040
output 2	63.170	0.000	0.000	63.170
input 1	136241257.000	0.000	0.000	136241257.000
input 2	977452867.000	0.000	0.000	977452867.000
input 3	72383936.000	0.000	0.000	72383936.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	1.000	

Results for firm: 3 (2013)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original	radial	slack	projected
	value	movement	movement	value
output 1	5.940	0.000	0.000	5.940
output 2	63.930	0.000	0.000	63.930
input 1	187170467.000	0.000	0.000	187170467.000
input 2	1043185355.000	0.000	0.000	1043185355.000
input 3	441006518.000	0.000	0.000	441006518.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	1.000	

Results for firm: 3 (2014)
 Technical efficiency = 1.000
 Scale efficiency = 0.953 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	5.710	0.000	0.000	5.710
output 2	64.270	0.000	0.000	64.270
input 1	248697186.000	0.000	0.000	248697186.000
input 2	1494604202.000	0.000	0.000	1494604202.000
input 3	401229408.000	0.000	0.000	401229408.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	1.000	

Results for firm: 3 (2015)
 Technical efficiency = 0.854
 Scale efficiency = 0.923 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	5.010	0.000	0.420	5.430
output 2	65.230	0.000	11.190	76.420
input 1	314621269.000	-45805195.000	0.000	268816074.000
input 2	1159888702.000	-168866295.474	-362790346.526	628232060.000
input 3	701316892.000	-102103577.094	-309465559.906	289747755.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	1.000	

Sumber: data diolah menggunakan DEAP 2.1

LAMPIRAN 11. Efisiensi Kota Cimahi

Results for firm: 4 (2011)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	5.550	0.000	0.000	5.550
output 2	74.410	0.000	0.000	74.410
input 1	116677729.000	0.000	0.000	116677729.000
input 2	422164126.000	0.000	0.000	422164126.000
input 3	138935575.000	0.000	0.000	138935575.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
4	1.000	

Results for firm: 4 (2012)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	6.240	0.000	0.000	6.240
output 2	74.990	0.000	0.000	74.990
input 1	144540602.000	0.000	0.000	144540602.000
input 2	541183364.000	0.000	0.000	541183364.000
input 3	186828596.000	0.000	0.000	186828596.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
4	1.000	

Results for firm: 4 (2013)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	5.650	0.000	0.000	5.650
output 2	75.850	0.000	0.000	75.850
input 1	191599456.000	0.000	0.000	191599456.000
input 2	5708938914.000	0.000	0.000	5708938914.000
input 3	212856825.000	0.000	0.000	212856825.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
4	1.000	

Results for firm: 4 (2014)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	5.490	0.000	0.000	5.490
output 2	76.060	0.000	0.000	76.060
input 1	227949120.000	0.000	0.000	227949120.000
input 2	625419291.000	0.000	0.000	625419291.000
input 3	263765853.000	0.000	0.000	263765853.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
4	1.000	

Results for firm: 4 (2015)

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	5.430	0.000	0.000	5.430
output 2	76.420	0.000	0.000	76.420
input 1	268816074.000	0.000	0.000	268816074.000
input 2	628232060.000	0.000	0.000	628232060.000
input 3	289747755.000	0.000	0.000	289747755.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
4	1.000	

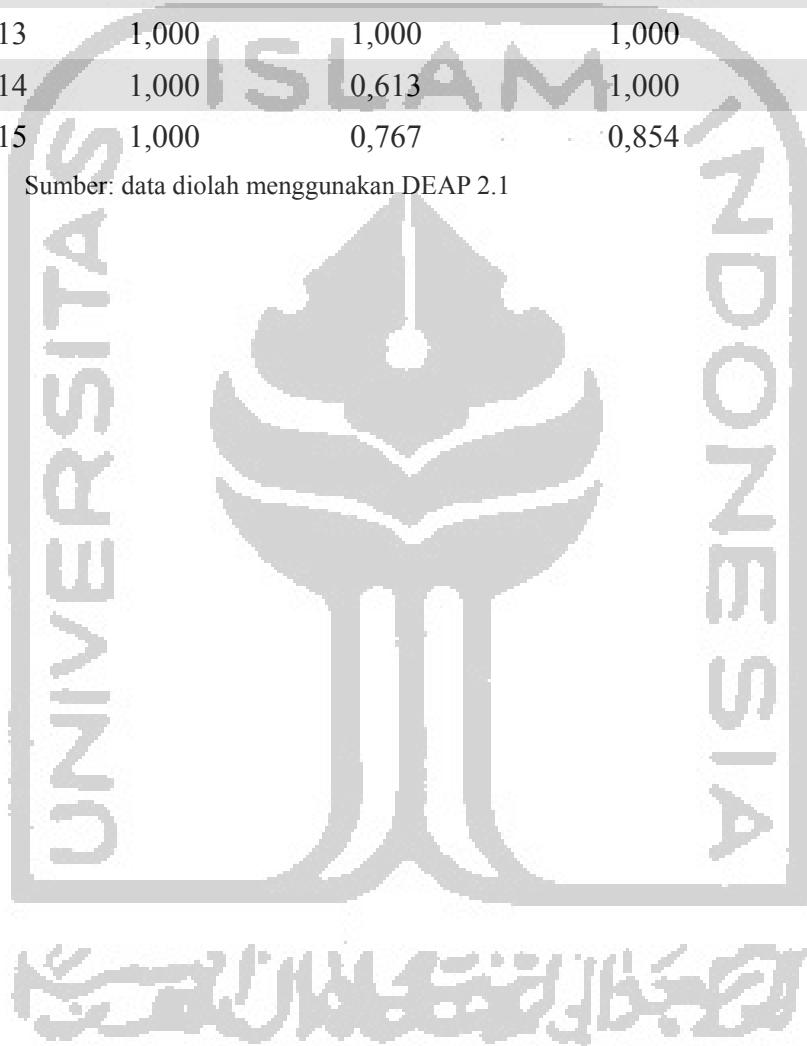
Sumber: data diolah menggunakan DEAP 2.1

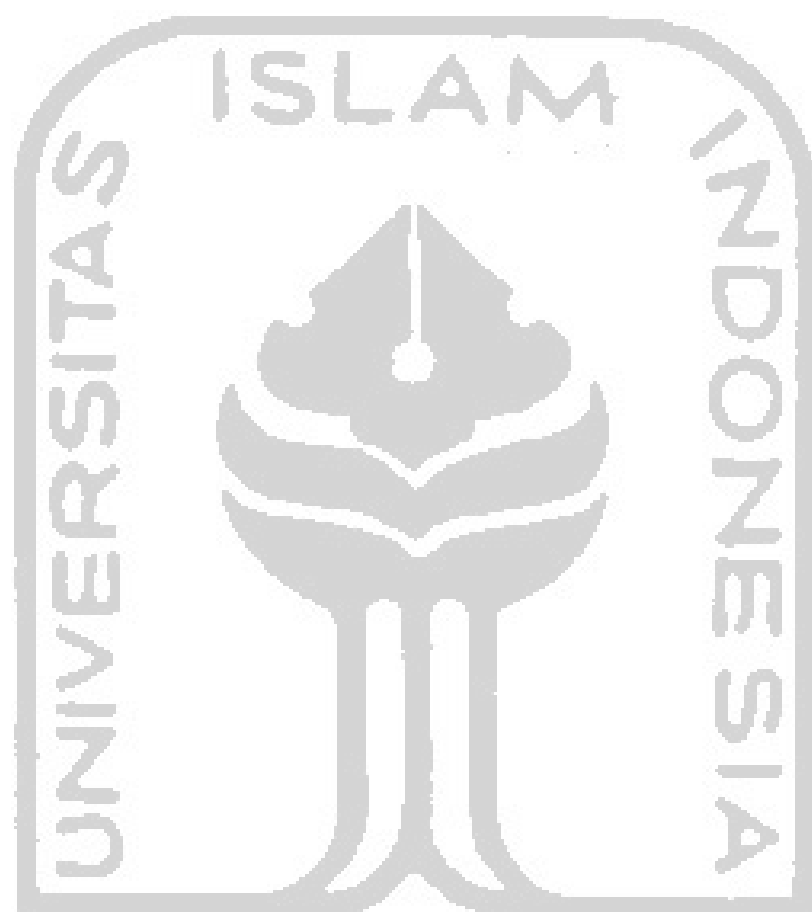
**LAMPIRAN 12. Nilai Efisiensi 4 Daerah di Jawa Barat Tahun
2011-2015**

Daerah

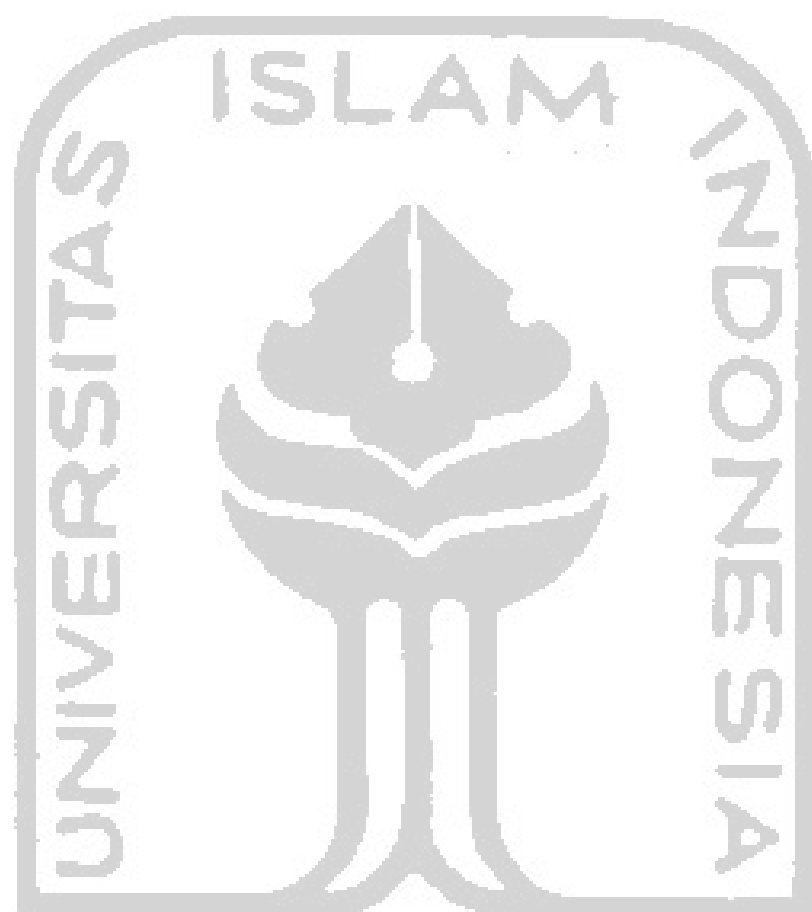
Tahun	Kota Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung Barat	Kota Cimahi
2011	1,000	0,583	1,000	1,000
2012	1,000	1,000	1,000	1,000
2013	1,000	1,000	1,000	1,000
2014	1,000	0,613	1,000	1,000
2015	1,000	0,767	0,854	1,000

Sumber: data diolah menggunakan DEAP 2.1

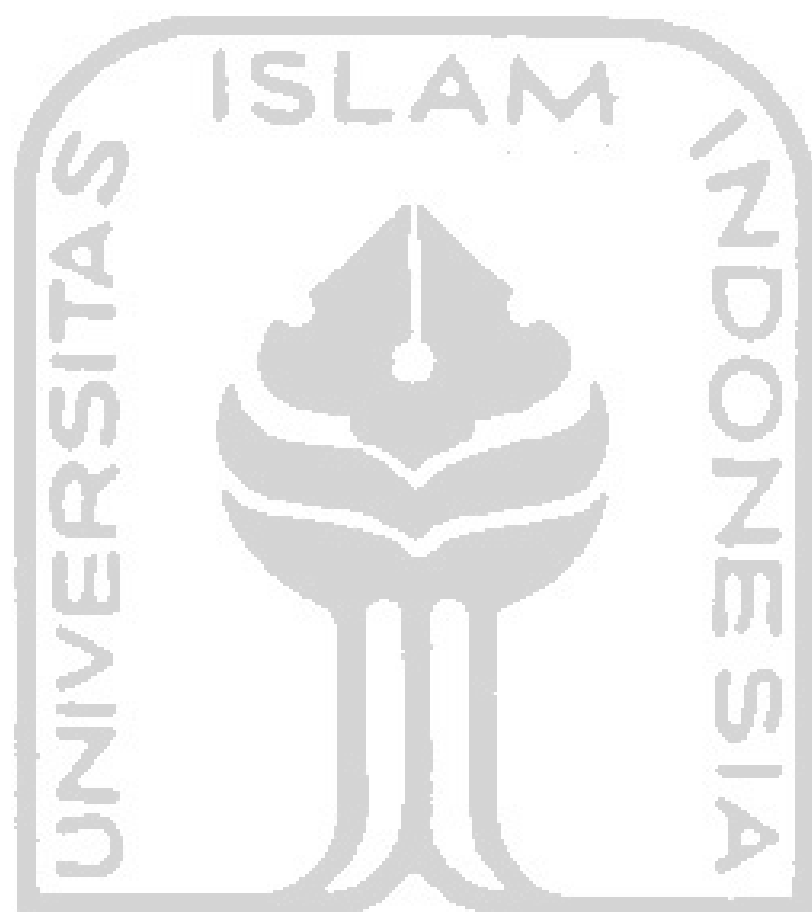




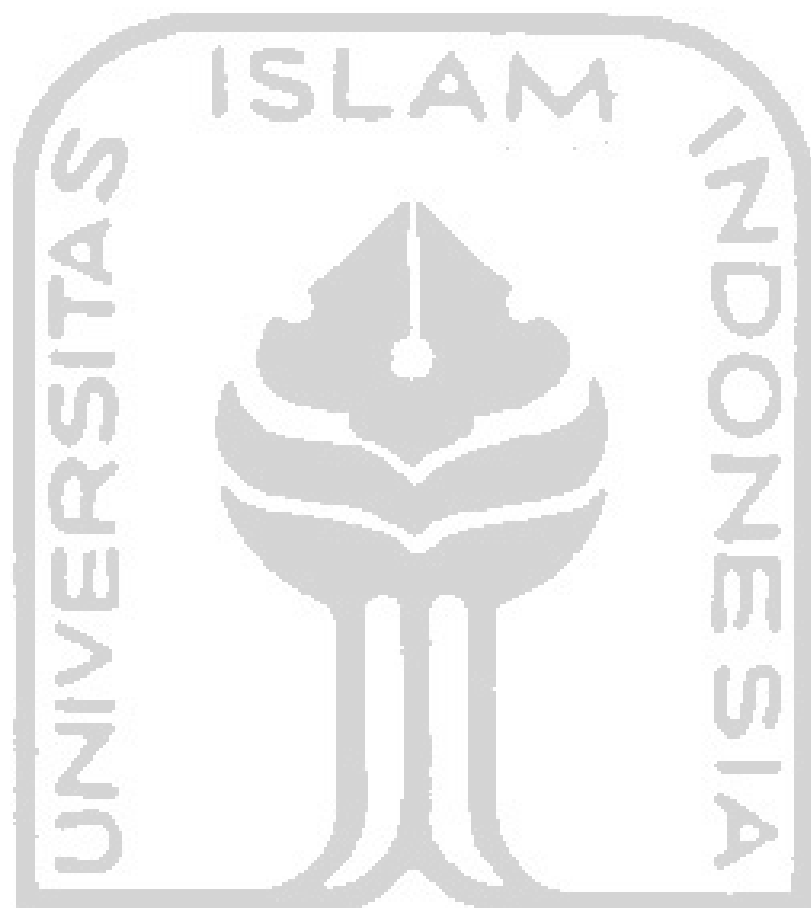
جامعة الإسلام في إندونيسيا



جامعة الإسلام في إندونيسيا



جامعة الإسلام في إندونيسيا



جامعة الإسلام في إندونيسيا